Jurnal Pendidikan Indonesia:
Teori, Penelitian dan Inovasi
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jpi.v6i1.2847
Vol. 6, No. 3, Mei 2026

INDUSTRIALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA: ANTARA TUNTUTAN PASAR KERJA DAN KRISIS NILAI HUMANISTIK

Siti Maspuah Fitrianingsih[1], Dr. Rustam Ibrahim, M.Si[2]
[1]Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
[2] Dosen Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
email:[1]maspuah.siti91@gmail.com, [2]rustamibrahim@staff.uinsaid.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-05-22
Revised : 2026-05-26
Accepted : 2026-05-29

KEYWORDS
The Industrialization of Education, The Labor Market, The Commercialization of Education, Humanistic Values, The Education Crisis

KATA KUNCI
Industrialisasi Pendidikan, Pasar Kerja, Komersialisasi Pendidikan, Nilai Humanistik, Krisis Pendidikan

ABSTRACT
Education is a fundamental human right and a means of character building and improving the quality of human resources. However, the development of globalization and industrialization has pushed education in Indonesia towards a market orientation that places greater emphasis on the needs of the workforce than on strengthening humanistic values. This study aims to analyze the phenomenon of the industrialization of education, its relationship to job market demands, and its implications for the weakening of humanistic values. The study used a qualitative approach with library research methods through a review of various scientific journals, books, and relevant academic sources. The results show that the industrialization of education has pushed educational institutions to become increasingly oriented towards market mechanisms and labor production. This condition has resulted in increased commercialization of education, unequal access to education, and the weakening of humanistic values such as justice, empathy, social responsibility, and character building. Thus, the industrialization of education not only influences the orientation of national education but also gives rise to a crisis of humanistic values that threatens the goal of education as a process of humanization.

ABSTRAK
Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia sekaligus sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, perkembangan globalisasi dan industrialisasi telah mendorong pendidikan di Indonesia menuju orientasi pasar yang lebih menekankan kebutuhan dunia kerja dibandingkan penguatan nilai-nilai humanistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena industrialisasi pendidikan, kaitannya dengan tuntutan pasar kerja, serta implikasinya terhadap melemahnya nilai-nilai humanistik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi pendidikan mendorong lembaga pendidikan semakin berorientasi pada mekanisme pasar dan produksi tenaga kerja. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya komersialisasi pendidikan, ketimpangan akses pendidikan, serta melemahnya nilai-nilai humanistik seperti keadilan, empati, tanggung jawab sosial, dan pembentukan karakter. Kesimpulannya, industrialisasi pendidikan tidak hanya memengaruhi orientasi pendidikan nasional, tetapi juga memunculkan krisis nilai humanistik yang mengancam tujuan pendidikan sebagai proses humanisasi manusia.

1. Pendahuluan

Dalam berbagai wacana dan literatur sering dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak oleh setiap manusia. Sistem perundang-undangan bahkan setiap agama mengakui hal tersebut. Namun dewasa ini, kenyataan yang kita hadapi menunjukkan hal sebaliknya. Pendidikan menjadi barang mahal yang hanya terbeli oleh kalangan berkantong tebal. Pendidikan sudah menjelma menjadi komoditas yang bernilai jual menjanjikan. Sekolah dan perguruan tinggi telah menjadi semacam badan usaha yang merasa berhak "menjual" jasa pendidikan kepada rakyat sesuai mekanisme pasar. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula posisi tawarnya. Pusat-pusat pendidikan favorit semakin tak terdatangi oleh rakyat biasa.(Zainuddin dan Rozali, 2022)

Pendidikan bukan hanya berperan sebagai pembentuk karakter dan kepribadian, melainkan juga sebagai persiapan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh pendidikan sangat signifikan dalam menghadapi dampak globalisasi yang telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan dalam sektor pendidikan itu sendiri. Saat ini, pendidikan terjebak dalam arus komersialisasi, yang mengakibatkan biaya pendidikan yang tinggi. (purwaningrum, Alifiani dan Subhi, 2023). Dampaknya adalah bahwa banyak anak dari latar belakang ekonomi rendah mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Sistem pendidikan tinggi yang berorientasi pasar berada di garis depan. Meningkatnya permintaan akan pendidikan tinggi telah menyebabkan perubahan dalam penawaran. Pendidikan tinggi, yang awalnya merupakan layanan yang didukung pemerintah, kini telah memasuki pasar. Seiring dengan globalisasi dan teknokratisasi, universitas dan perguruan tinggi telah mengalami transformasi besar dan bersaing ketat satu sama lain di pasar global untuk pendidikan tinggi. Hal ini telah memainkan peran besar sebagai respons terhadap menyusutnya peran negara. (Gupta, 2018)

Mungkin realitas di atas masih bisa dimaklumi jika pelakunya hanya lembaga swasta. Akan tetapi, sungguh sulit diterima ketika bisnis pendidikan juga dilakoni lembaga pendidikan pemerintah. Sistem pendidikan mulai menjadikan sekolah sebagai *coorporate education* yang kental nuansa bisnisnya. Lembaga-lembaga pendidikan pemerintah sedang berbenah menuju sebuah perusahaan bisnis yang siap memburu pemasukan sebanyak-banyaknya untuk "biaya operasional" dan meraup keuntungan. Sementara masyarakat dengan kemampuan ekonomi pas-pasan semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak(Zainuddin dan Rozali, 2022)

Komersialisasi dan industrialisasi pendidikan tinggi sebenarnya bukan hal yang baru di Tanah Air. Jauh sebelum kebijakan otonomi kampus digulirkan dan dituangkan dengan peraturan pemerintah yang menetapkan universitas negeri berubah posisi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), komersialisasi pendidikan tinggi sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Memang harus diakui, meski komersialisasi melanda pendidikan tinggi swasta, beberapa di antaranya memang bonafit. Mereka mempunyai keunggulan karena didukung sumber daya yang andal, yayasan yang kukuh, serta komitmen pada pengabdian bangsa yang kuat, meski pada sektor pembiayaan mereka relatif lebih mandiri. Implikasi teoritis yang ditimbulkan, pendidikan tinggi swasta yang bonafit selalu mensyaratkan biaya yang tinggi bagi mahasiswanya. (Zamroni, 2008).

Ekses negatif yang ditimbulkan mereka hanya mahir menjalankan instruksi teknis dan bukannya berpikir kritis dan reflektif terhadap problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia yang kian kompleks. Karena proses pendidikan di kampus hanya dipersiapkan untuk dunia kerja, bukan untuk menciptakan kemandirian sosial maupun peningkatan kualitas diri. Tak heran jika nalar pragmatisme semakin merebak disetiap lini kehidupan. Logika *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja semakin deras menjangkiti pola pikir masyarakat kita. Akibat semakin menguatnya liberalisasi, hampir semua orang "dipaksa" untuk turut serta memenuhi kebutuhan pasar. Ini artinya filsafat pendidikan pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dari filsafat kebudayaan yang lebih luas di mana pendidikan menjadi bagian yang mencerminkan arus besar yang melingkupinya. (Zamroni, 2008)

Realitasnya, pendidikan dewasa ini mengalami krisis nilai. Pendidikan hanya menghasilkan *output-output* atau lulusan yang pintar secara kognitif, banyak menguasai teori dan teknologi, tetapi kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam penerapannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana anak bisa mencapai nilai yang tinggi, artinya keberhasilan seorang anak hanya diukur dengan angka atau nilai raport, menguasai teknologi, cepat mencapai gelar Sarjana, Master, Doktor atau Profesor, setelah lulus dari instansi pendidikan akan kerja di mana, dan sebagainya.

Nilai-nilai humanistik, jujur, disiplin, tanggung jawab terabaikan dan kurang mendapat perhatian utama baik dari lembaga pendidikan maupun masyarakat. Para peneliti telah mengeksplorasi "marketisasi" pendidikan ini, fokus bagaimana restrukturisasi ekonomi dimanifestasikan dalam pendidikan terkait dengan penciptaan pasar baru untuk investasi modal dan penjaminan penjualan massal teknologi informasi dan komunikasi baru. Para pendidik mengajukan kritik ideologis terhadap praktik ini karena telah melanggar nilai-nilai pendidikan dan pekerjaan pendidik dianggap bisnis. (Dewi, 2019)

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat potret atau gambaran pendidikan di era industri dan globalisasi ini, keberhasilan manusia diatur dan diukur oleh mesin, teknologi, dan mengabaikan kecerdasan humanis yang sebenarnya harus diprioritaskan diatas pengetahuan lainnya. Dampak dari hal ini akan melahirkan individu-individu yang memiliki orientasi hidup hedonis, materialistis dan memiliki kepribadian yang terbelah (*split personality*). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan tradisi fenomenologi yang memusatkan perhatian pada pengalaman hidup dan mencari makna mengenai realitas berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Brouwer mengatakan bahwa seorang fenomenolog senang melihat gejala atau fenomena. Fenomenologi bukan suatu ilmu. Tidak ada sistem, tidak ada hipotesa, tidak ada teori. Akan tetapi fenomenologi adalah suatu metode pemikiran, *a way of looking at things*. Fenomenologi adalah subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. (Dewi, 2019). Kajian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mencoba untuk menjawab permasalahan industrialisasi pendidikan di Indonesia dengan menawarkan upaya-upaya yang harus dilakukan lembaga-lembaga pendidikan untuk melahirkan manusia yang bermartabat, berkualitas dan bertanggung jawab.

2. Metode

Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian Pustaka (library research). Kajian Pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini menekankan pada eksplorasi konseptual dan teoretis dari berbagai sumber jurnal ilmiah yang kredibel.

Metode penelitian kepustakaan (*library research)* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari literatur. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber Pustaka untuk memperoleh data penelitian, dimana data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dikaji (Zulfirman, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-kaya ilmiah utama yang secara langsung membahas tema penelitian, baik berupa buku referensi maupun artikel jurnal terindeks. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti hasil penelitian terdahulu, prosiding, serta dokumen akademik lain yang memilki relevansi dengan fokus kajian

3. Hasil dan Pembahasan

Industrialisasi Pendidikan di Indonesia

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Transformasi struktural merupakan perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisonal yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi. (Oentoro *et al.*, 2024)

Sumbangan pendidikan besar terjadi setelah perang yaitu pada masa-masa pembangunan kembali pasca perang dunia II (PD II), pendidikan menyumbang perubahan dari kekacauan jiwa, raga, sosial dan konstruksi budaya pada kemajuan, keselarasan dan mutu kehidupan. Pendidikan juga telah membuka berbagai alternatif dalam perubahan dan pembangunan masyarakat, pendidikan juga mendorong ditemukannya hasil-hasil penelitian sebagai hasil praksis perubahan. Semangat dan slogan perubahan yang disandang pendidikan menjadi tidak bermakna lagi dengan pergeseran paradigma perubahan sosial, makna tatanan nilai-moral masyarakat, dinamika budaya, kemajuan masyarakat, dulu sering dikaitkan dengan pendidikan. (Unwanullah, 2015)

Sikap dan prasangka seseorang selalu menentukan objek dan sifat pembahasannya. Apa yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia seperti di banyak tempat lain, telah dialami dan dibahas secara berbeda-beda oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Dua di antaranya saling bertolak belakang. Di satu pihak, kita menjumpai mereka yang menyaksikan nasib pendidikan dengan wajah muram, dan membahasnya dengan penuh ratapan, penyesalan kalau bukan kemarahan. Antara lain, mereka mengatakan bahwa mutu pendidikan kita semakin merosot (dengan berbagai ukuran dan penyebab yang tidak seragam dalam berbagai uraian mereka) hal-hal seperti industrialisasi atau globalisasi dianggap sebagai sebuah ancaman atau musuh pendidikan. Di pihak lain, juga dijumpai yang dengan giat membuka berbagai wilayah baru dalam dunia pendidikan. (Unwanullah, 2015)

Dengan bersemangat mereka menyebarkan berita seakan-akan dunia pendidikan telah menikmati sebuah kebangkitan baru dan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan yang tak terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi, jaringan kerja antar lembaga pendidikan mancanegara, serta semakin meluasnya kesempatan belajar bagi kaum muda usia sekolah dari berbagai latar belakang sosial dikemukakan sebagai beberapa contoh kemajuan terpenting yang pantas dirayakan dan disyukuri dalam bidang pendidikan. Sejumlah angka statistik dikutip dan dipajang dalam tabel dan grafik. Kontras kedua pandangan itu sengaja dibuat agak kasar dan berlebihan untuk memperjelas rentang perbedaan sikap yang tumbuh dalam masyarakat terhadap perubahan dunia pendidikan di Indonesia. Betapa pun keduanya bertolak belakang, mereka sama-sama sepakat bahwa dunia pendidikan kita telah dan masih sedang mengalami perombakan besar-besaran yang tidak selalu dilaksanakan dengan kesepakatan semua pihak. Bahkan kadang-kadang di luar kendali siapa pun, walau dimanfaatkan oleh beberapa pihak secara tidak merata.(Unwanullah, 2015)

Sekarang pendidikan lebih jauh lebih tersebar dan terjangkau oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai pelosok dunia. Perbedaan kesempatan bersekolah antara jenis kelamin, atau antara desa dan kota sudah jauh lebih baik. Tidak salah jika ini dianggap sebagai sebuah proses pemerataan dan demokratisasi pendidikan. Proses belajar mengajar juga jauh lebih fleksibel, bahkan menarik berkat berbagai teknologi informasi. Belajar tidak lagi harus bersusah-payah, memencilkan diri, bertahan dalam kebosanan, atau mengerjakan sesuatu berulang-ulang, lamban dan rumit. Dengan komputer dan internet, pendidikan menjadi penuh warna dan pesona. Semua persoalan itu tidak salah, tetapi proses pemerataan pendidikan juga telah disertai perbedaan jenjang dan gengsi dalam berbagai bentuk baru. Ternyata kemudahan, ketepatan, dan kecepatan proses olah informasi tidak sama dengan peningkatan kecerdasan, kreativitas, apalagi kepekaan, anak belajar terhadap masalah-masalah sosial. Malahan berbagai lembaga pendidikan padat teknologi tinggi telah menumbuhkan sebuah ketergantungan baru pada teknologi yang sangat mencemaskan. Ia juga menumbuhkan penyempitan sikap, minat, serta cakrawala pemahaman persoalan menjadi serba singkat, cepat, dan instrumental.(Unwanullah, 2015)

Pendidikan di Indonesia tidak saja mengalami proses Industrialisasi tetapi juga internasionalisasi. Ada perbedaan penting yang layak disimak di antara proses itu dalam bidang ekonomi dan proses serupa dalam bidang pendidikan. Secara lebih khusus, perbedaan yang penting terjadi pada status dan nasib perusahaan-perusahaan dagang dengan status atau nasib lembaga-lembaga pendidikan. Bagi perusahaan besar, globalisasi biasanya merupakan peluang, rejeki, dan impian yang menjadi kenyataan. Tanpa globalisasi, upaya dagang dan akumulasi modal sering kali terbentur oleh batas-batas kedaulatan, birokrasi, atau sentimen kebangsaan–kenegaraan. Globalisasi dalam bentuk pertumbuhan bidang informasi, komunikasi, dan transportasi merupakan sebuah peluang atau jembatan emas bagi pemodal untuk menembus berbagai batas ruang dan waktu bagi akumulasi modal dan perbesaran laba sebesar-besarnya. (Unwanullah, 2015)

Seperti telah kita ketahui bersama semua ini menjadi salah satu sumber keunggulan para pemodal besar jika dibandingkan dengan kaum buruh dan birokrasi negara, yakni kemampuan melompat dari suatu wilayah (lokal, negara atau benua) ke wilayah lain. Dengan demikian, ia tidak harus bertahan dengan satu kondisi hubungan industrial di satu lokasi dengan kelompok buruh atau peraturan birokrasi yang menjengkelkan. Kemampuan berpindah-pindah ini atau mobilitas, membuat pemodal sering kali dibutuhkan dari pada membutuhkan baik buruh maupun birokrasi negara tertentu. Kesenjangan serupa barangkali dapat dibandingkan dengan kesenjangan gender pada keluarga tradisional kelas menengah: kaum suami menguasai dunia publik dan memiliki mobilitas tinggi, sementara kaum istri terikat pada dunia domestik. Itu sebabnya berita hengkangnya modal dan pemodal untuk menanamkan kembali modal di

negara yang sedang sakit-sakitan, disertai sejumlah janji, perlakuan istimewa, dan kemanjaan supaya mereka kerasan. (Unwanullah, 2015)

Hingga sekitar pertengahan dasawarsa 1990-an, mahasiswa dari Asia yang belajar ke negara-negara industrial di Barat dianggap lebih rendah daripada mahasiswa lokal. Para mahasiswa pendatang ini mungkin saja termasuk yang paling cerdas di kelas, tetapi mereka tetap dianggap sebagai makhluk yang berbeda dan tidak akan pernah menjadi sama atau setara dengan anak-anak Barat sendiri. Anak-anak Asia ini dianggap dan sering kali juga menganggap diri sendiri sebagai kaum elite dari negeri terbelakang yang beruntung karena mendapatkan pencerahan dari Barat, sebuah warisan peradaban paling unggul di dunia. Mereka harus belajar pandai-pandai berbahasa bekas penjajah ini, mereka harus paham sopan santun ala Barat, dan memahami seluk-beluk bekerjanya birokrasi di lembaga pendidikan Barat agar mampu menamatkan perkuliahan dan mendapatkan gelar bergengsi di negara bekas penjajah. (Unwanullah, 2015)

Anak-anak Asia mendapat perlakuan istimewa dalam berbagai birokrasi pendaftaran dan perkuliahan. Gejala ini tidak merata, dan kini lebih terasa di negeri Australia misalnya, dari pada Amerika Serikat atau Eropa. Tetapi sebagai gejala umum dia dapat dijumpai di berbagai tempat itu dengan kadar berbeda. Seorang rektor sebuah Universitas besar di Australia baru-baru ini menyatakan dengan tegas bahwa pada zaman ini pendidikan merupakan salah satu industri terbesar dan terpenting di dunia. Jadi pendidikan dapat diseret berdampingan dengan industri komputer, telepon genggam, tekstil, minyak, kalau bukan bursa saham. Rektor yang sama dengan rendah hati mengatakan bahwa universitas tidak mampu mengubah dunia dan membuatnya lebih baik. (Unwanullah, 2015)

Di hampir semua kampus di negara-negara industri, setiap fakultas dihargai dan hanya bisa bertahan hidup apabila berhasil mendatangkan sejumlah mahasiswa peminat dan pembayaran uang kuliah. Akibatnya, setiap dosen yang bekerja di fakultas itu juga dihargai menurut kemampuannya "menjual" perkuliahan yang dihitung menurut jumlah mahasiswa. Semua ini bisa berakibat buruk apabila tidak ada mekanisme kontrol kualitas secara kelembagaan. Untuk menarik mahasiswa sebanyak-banyaknya, para dosen bisa saja berlomba membuat pelajaran seringan mungkin, ujian semudah mungkin, nilai semurah mungkin, pekerjaan rumah sesedikit mungkin dengan lelucon dan bukan analisis kritis. Promosi pangkat, status, bonus tahunan, cuti, dan sejumlah hak kerja sang dosen ditentukan seminimal mungkin, dan beban tugas mereka melimpah. Semua ini demi menekan ongkos produksi pendidikan. Akibat berikutnya, para dosen ini terlalu sibuk mempertahankan status kepegawaiannya, tak pernah punya waktu cukup untuk berinteraksi dengan mahasiswa di luar jam kuliah, atau bahkan untuk mengembangkan diri secara intelektual. (Unwanullah, 2015)

Konsep Komersialisasi Pendidikan

Pengertian komersialisasi pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), komersialisasi diartikan sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan, karena menurut kamus, kata komersial atau *commercialize* berarti memperdagangkan. Komersialisasi pendidikan dimaknai sebagai sebuah manajemen pendidikan yang menempatkan lembaga pendidikan sebuah institusi komersial. Sebagai lembaga komersial, maka lembaga pendidikan akan mengimplementasikan prinsip prilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal, tujuan produksi adalah untuk "*Profit Maximilizing"* dalam hal ini dimaknai secara finansial. (Yulianti *et al*., 2024)

Terdapat dua konsep dalam komersialisasi pendidikan. Pertama, komersialisasi pendidikan yang menekankan pada program dan peralatan pendidikan yang mahal. Kedua, komersialisasi pendidikan yang hanya memprioritaskan biaya pendaftaran dan biaya gedung, tanpa memerhatikan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dilakukan. Pemahaman pertama akan mengakibatkan diskriminasi dalam pendidikan, sedangkan pengertian yang kedua, lembaga pendidikan menjanjikan pelayanan namun di bawah standar keuangan yang dibayarkan dengan pengambilan laba. Namun dalam hal ini, pengertian komersialisasi yang pertama yang digunakan. (Yulianti *et al.,* 2024)

Proses pendidikan sebagai humanisme menunjukkan,bahwa pendidikan bukanlah suatu yang telah tertentu (*given*), tetapi merupakan suatu aksi yang berkelanjutan. Proses pendidikan merupakan suatu kesatuan dari aksi refleksi-aksi. Inilah ciri khas dari pendidikan sebagai ilmu praksis. Habibie dalam Darmaningtyas (2005:257), bahwa "komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat". Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa

pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-supplay pasar industri dan diukur secara ekonomis. Pendidikan menjadi hal yang eksklusif dan jauh dari masyarakat umum bahkan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu (elit penguasa). Komersialisasi pendidikan menurut Agus Wibowo (2008:111) juga mengacu pada dua pengertian yang berbeda yaitu sebagai berikut. (Yulianti *et al*., 2024)

Pertama, Komersialisasi hanya mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pendidikan serta perlengkapan yang serba mahal. Selain itu, komersialisasi pendidikan juga mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus diberikan kepada siswa.

Kedua, Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga tersebut tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan, tetapi uang pembayaran sekolah sangat mahal. Pemungutan biaya tinggi hanya untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi, laboratorium dan perpustakaan yang baik serta memberikan kepada para guru atau dosen gaji menurut standar. Sedangkan untuk sisa anggaran yang diperoleh, digunakan untuk menanamkan kembali bentuk infrastruktur pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.

Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasa dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, tetapi tidak sepadan dengan uang yang pungut. Memang di Indonseia pendidikan diperhatikan dan diwajibkan dengan istilah wajib belajar. Hal ini sebagai konsep wajib belajar di bagi usia wajib belajar yaitu wajib belajar 9 tahun sudah termaktub dalam landasan yuridis Indonesia. Bahkan menurut PP No. 7 2008 wajib belajar itu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Konsep wajib belajar dalam analisa penulis dapat dilihat pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa ,"Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah".

Persoalan sekarang yaitu siapa yang membiayai pendidikan, ketika pembiayaan menjadi tanggungjawab individu, tentuini bisa diskriminasi pendidikan bahkan bisa menjadi komersialisasi pendidikan. Padahal pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, terlebih bagi pemimpin publik yang miliki tugas multi dimensi. Tugas kesejahteraan umat tentunya menjadi tanggung jawab yang harus diemban dipundaknya, termasuk pembiayaan pendidikan Apalagi saat merujuk pada pembukaan UUD 1945, pembiayaan pendidikan total harus menjadi tanggungjawab pemerintah/negara, sehingga warga negara Indonesia membayar pajak kepada Negara, yangdipakai untuk pembangunan agar bisa membantu lajunya pertumbuhan kesejahteraan. Pembangunan tersebut salah satunya pada sektor pendidikan (Yulianti *et al.,* 2024)

Mahalnya biaya pendidikan disebabkan oleh arus komersialisasi pendidikan. Saat ini pendidikan telah menjadi komoditas yang ditawarkan kepada siswa atau wali murid dengan berbagai variasi biaya pendidikan. Banyak masyarakat yang terbebani oleh pungutan di berbagai sekolah. Hal tersebut tentu sangat memberatkan orang tua karena jumlah yang harus dibayar tidak sedikit. Munculnya komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan berbagai dampak diberbagai lapisan masyarakat ini, pastinya didasari oleh berbagai sebab. Komersialisasi pendidikan timbul dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Seperti politik, ekonomi, budaya, sosial dan teknologi (Yulianti *et al.*, 2024)

Dalam studi ketenagakerjaan dan rekrutmen tenaga kerja, baik untuk pasar kerja lokal maupun internasional, sebagian akademisi memberi perhatian cukup besar pada aspek komersial, yakni perusahaan penyalur jasa pekerja. Namun, proses penempatan tenaga kerja terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak, sehingga menelaahnya dari aspek komersial saja tidaklah cukup. Dalam berbagai proses penempatan tenaga kerja, para peneliti dan pengamat kurang memberikan perhatian pada proses yang disebut 'produksi tenaga kerja' (*the production of manpower*). Produksi tenaga kerja adalah sebuah proses praperekrutan dalam rantai penempatan

pekerja yang melibatkan institusi pendidikan dan industri, di mana para pelajar dicetak untuk menjadi kelas pekerja. Dalam kerangka konseptual ini, 'pelajar' dipahami sebagai 'calon pekerja'. Sekeluarnya dari fase pendidikan, mereka memasuki bilik-bilik pemrosesan barang dagangan di pabrik-pabrik, menjadi pelayan di toko-toko waralaba, pramusaji di restoran cepat saji, pengontrol di ruang-ruang pembuatan suku cadang, dan lain sebagainya. Dalam kacamata perekrutan etik, proses pelatihan atau produksi tenaga kerja ini tak dapat diabaikan begitu saja, dan bahkan merupakan pangkal dari perdebatan mengenai perlindungan terhadap para pekerja. (Dewanto & Hadi, 2022).

Komersialisasi pendidikan tidak dapat dipahami sebagai fenomena lokal atau sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi global sistem pendidikan di bawah hegemoni kapitalisme lanjut dan neoliberalisme. Pendidikan dalam konteks ini diposisikan sebagai komoditas yang tunduk pada logika pasar, efisiensi, kompetisi, dan profitabilitas. Apple (2019) menegaskan bahwa pendidikan modern semakin terjerat dalam relasi kuasa ekonomi-politik yang menjadikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai instrumen reproduksi ideologi pasar. Dalam kerangka ini, nilai-nilai intrinsik pendidikan seperti pembebasan, pembentukan karakter, dan keadilan sosial mengalami reduksi makna. (Hamuddin *et al.*, 2019)

Pendidikan menjadi berbelok arah dan mengkhianati Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Akses Pendidikan seperti akses pasar bebas yang dengan suka ria menjual segala pengetahuan yang ada di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan hambatan SDM suatu wilayah menjadi mandek, kaum yang lemah yang tidak bisa mengakses Pendidikan karena terkendala biaya memilih diam karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa mengakses dunia Pendidikan. Dampak tersebut bukanlah dampak biasa untuk suatu kemajuan bangsa, karena suatu bangsa menjadi maju dilihat dari aspek pendidikannya.(Saputra, 2023)

Komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar *market society*. Komersialisasi Pendidikan membuat petaka baru yakni menjadikan jurang pemisah baru antara pemilik modal dan klas tidak memiliki modal, hal tersebut mengakibatkan adanya pertentangan baru yang berkelanjutan – akibatnya humanism dalam dunia Pendidikan menjadi tak tergapai. Komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan moderen, mengabdi kepada pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas(Saputra, 2023)

Munculnya komersialisasikan membuat Pendidikan seperti barang dagangan yang dapat diperjualbelikan bebas, tetapi jika Pendidikan di analogikan sebagai barang dagangan. Pendidikan bukanlah barang dagangan yang murahan, Pendidikan menunjukkan dirinya sebagai barang dagangan yang berkelas artinya kita tahu bahwa barang berkelas tidak semua orang bisa mendapatkannya. (Saputra, 2023)

Dampak Industrialisasi Pendidikan terhadap Nilai Humanistik

Komersialisasi Pendidikan sangat menampar kaum yang lemah, karena Pendidikan yang harusnya bersifat publik menjadi privatisasi. Adanya komersialisasi Pendidikan menjadi kaum pemilik modal berjaga jarak dengan kaum yang lemah. Privatisasi Pendidikan terjadi karena mahalnya biaya Pendidikan, mahalnya biaya untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang tinggi membuat kaum yang lemah tidak mampu menempuh Pendidikan lanjutan. Dampaknya juga bukan hanya privatisasi, tetapi menjadi esensi dari perguruan tinggi itu hilang. Hal itu terjadi missal saja ketika perekrutan dosen, calon dosen yang mempunyai koneksi lebih dengan kemitraan akan lebih mudah lolos karena hal itu bisa membuat relasi baru antara perguruan tinggi dengan kemitraan. Rekrutmen yang seperti itu akan membuat perguruan tinggi menjadi terperosok ke jurang, sebab perguruan tinggi tidak memperhatikan calon dosen mana yang lebih kompeten daripada calon dosen yang lebih banyak relasi dengan kemitraan. (Saputra, 2023)

Pencarian untung sebanyak-banyaknya akan membuat perguruan tinggi kehilangan prinsip kependidikan. Akibatnya para mahasiswa timbul rasa sinisme terhadap perguruan tinggi karena praktek-praktek dari perguruan tinggi yang menjadikan kampus sebagai ladang bisnis dan mencari keuntungan. Akhirnya mahasiswa dijadikan tumbal oleh perguruan tinggi untuk mengeruk dan mengambil keuntungan dari biaya-biaya sarana-prasarana perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik. Hal ini menjadi perhatian penting untuk kedepannya, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" seperti dikhianati oleh praktik komersialisasi Pendidikan. Pendidikan bukan menjadi hak segala rakyat karena akses perguruan tinggi yang tidak terjangkau, alhasil perguruan tinggi mengalami privatisasi dan hanya

bisa diakses oleh segelintir orang saja. (saputro, 2022)

Intervensi industri dalam Pendidikan juga menjadi perhatian penting dalam komersialisasi Pendidikan. Masuknya kapitalisme di ranah perguruan tinggi seperti membuat duri tajam di dunia Pendidikan. Akibatnya Pendidikan tak lagi netral dan mempunyai kepentingan yang dibuat kapitalisme. Diskriminasi Pendidikan yang di privatisasi memunculkan adanya kaum elit dan lemah, kaum yang elit akan di posisi atas, dan kaum yang lemah menjadi yang di posisi bawah. Komersialisasi Pendidikan memberikan dampak buruk bagi SDM di suatu wilayah dan impian kehidupan di masa depan, dengan kata lain kapitalis akan lebih mudah menerima mahasiswa dengan ekonomi yang elit dan tidak mempertimbang kualitasnya. Hal seperti ini dapat menghambat kemajuan suatu bangsa, karena kaum yang lemah tidak bisa mengakses Pendidikan, walau keintelektualan kaum lemah bisa lebih bagus.(Saputra, 2023)

Salah satu dampak paling nyata dari komersialisasi pendidikan adalah meningkatnya ketimpangan akses. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi penghalang struktural bagi kelompok miskin untuk mengakses pendidikan bermutu. Meskipun negara menyediakan skema bantuan seperti beasiswa, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme seleksi dan distribusi bantuan sering tidak sepenuhnya adil dan inklusif. Dalam perspektif keadilan sosial, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan. Namun, ketika pendidikan dikomersialkan, fungsi tersebut berbalik arah: pendidikan justru memperkuat stratifikasi sosial. Apple (2022) menyebut kondisi ini sebagai selective tradition, yakni proses seleksi sistemik yang menguntungkan kelompok tertentu dan meminggirkan yang lain. Bagi pendidikan Islam, persoalan ini menjadi sangat problematik karena bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), kesetaraan (musawah), dan keberpihakan kepada kaum mustadh‘afin. Pendidikan Islam idealnya menjadi instrumen pembebasan sosial, bukan mekanisme eksklusi ekonomi. (Budihartono *et al.,* 2025)

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai yang mendasari pendidikan juga mengalami perubahan. Jika pada masa lalu pendidikan dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, saat ini pendidikan mulai dipandang sebagai investasi individu. Orang tua dan siswa bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pendidikan yang diyakini dapat memberikan keuntungan ekonomi di masa depan. Fenomena ini mengarah pada peningkatan biaya pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. (Hasanah *et al.,* 2024)

Faktor Pendorong Komersialisasi Pendidikan yang *pertama,* Kurangnya Anggaran Pendidikan. Salah satu faktor utama yang mendorong komersialisasi pendidikan adalah Pemerintah, dalam banyak kasus, tidak mampu sepenuhnya membiayai kebutuhan pendidikan, terutama di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks. Akibatnya, sektor swasta mulai mengambil peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan pendidikan. Kurangnya anggaran pendidikan juga memperparah kondisi ini. Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat, seringkali dana tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Situasi ini memaksa sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui komersialisasi layanan pendidikan mereka (Hasanah *et al.,* 2024)

Kedua, Kompetisi Internasional. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai sarana lokal untuk membangun sumber daya manusia, tetapi sebagai alat kompetisi di panggung global16. Sekolah-sekolah dan universitas bersaing untuk mencetak lulusan yang dapat bersaing secara internasional, yang seringkali memerlukan biaya tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti kurikulum internasional, fasilitas modern, dan pengajar berkualitas. Di Indonesia, tren ini terlihat jelas dengan munculnya sekolah-sekolah internasional dan universitas swasta yang menawarkan program gelar internasional. Lulusan dari institusi ini diharapkan memiliki kemampuan lebih baik untuk bersaing di pasar tenaga kerja global, meskipun biaya pendidikan di tempat-tempat tersebut sangat mahal. (Hasanah *et al.*, 2024).

Ketiga, Tuntutan Pasar Kerja dan Pendidikan Berbasis Kompetensi. Pasar kerja yang semakin kompetitif juga mendorong terjadinya komersialisasi pendidikan. Banyak orang tua dan siswa bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pendidikan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah pun merespons dengan menawarkan program-program pendidikan berbasis kompetensi yang lebih mahal, dengan janji bahwa lulusannya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau gaji yang lebih tinggi. (Hasanah *et al.,* 2024)

Keempat, Teknologi dan Inovasi Pendidikan. Meningkatnya peran teknologi dalam pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong komersialisasi. Penggunaan teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan alat-alat digital lainnya seringkali memerlukan biaya tambahan19. Institusi pendidikan yang menerapkan teknologi canggih seringkali menawarkan program pendidikan dengan biaya lebih tinggi, dengan alasan bahwa investasi tersebut diperlukan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan.(Hasanah *et al.*, 2024)

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi pendidikan di Indonesia berkembang seiring meningkatnya tuntutan pasar kerja, globalisasi, dan persaingan ekonomi modern. Pendidikan mengalami pergeseran orientasi dari proses humanisasi menuju mekanisme produksi tenaga kerja yang menekankan kompetensi teknis, efisiensi, dan daya saing industri. Kondisi ini terlihat dari semakin kuatnya konsep link and match, pendidikan berbasis kompetensi, serta meningkatnya komersialisasi lembaga pendidikan.

Industrialisasi pendidikan berdampak positif dalam penyediaan sumber daya manusia yang siap menghadapi kebutuhan industri dan pasar kerja. Namun, di sisi lain, industrialisasi pendidikan juga memunculkan berbagai persoalan serius, terutama meningkatnya komersialisasi pendidikan dan ketimpangan akses pendidikan berkualitas.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa industrialisasi pendidikan berkorelasi erat dengan krisis nilai humanistik. Pendidikan yang terlalu berorientasi pada pasar kerja cenderung mengabaikan pembentukan karakter, moralitas, empati, dan tanggung jawab sosial. Akibatnya, pendidikan lebih banyak menghasilkan individu yang unggul secara akademik dan teknis, tetapi kurang memiliki sensitivitas sosial dan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, permasalahan utama industrialisasi pendidikan bukan hanya terletak pada mahalnya biaya pendidikan atau orientasi pasar kerja semata, tetapi juga pada melemahnya nilai-nilai humanistik dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pasar kerja dan penguatan pendidikan berbasis nilai kemanusiaan agar pendidikan tetap berfungsi sebagai proses pembentukan manusia yang bermartabat.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat komitmen pembiayaan pendidikan agar akses terhadap pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi. Selain itu, kebijakan pendidikan hendaknya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan industri, tetapi juga memperhatikan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai humanistik. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menyeimbangkan orientasi antara tuntutan pasar kerja dan fungsi pendidikan sebagai proses humanisasi manusia. Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai moral, empati, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial secara substantif. Bagi pendidik, penting untuk mengembangkan proses pembelajaran yang kritis, reflektif, dialogis, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik, bukan hanya pencapaian akademik dan keterampilan teknis. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan empiris untuk melihat secara langsung dampak industrialisasi pendidikan terhadap perilaku peserta didik, kualitas moral lulusan, ketimpangan akses pendidikan, serta hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di berbagai daerah di Indonesia.

5. Referensi

Budihartono, B., Usman, S., & Damopolii, M. (2025). Komersialisasi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1*(2), 11–17. https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/153

Dewanto, P. A., & Hadi, M. S. (2022). Problematika SMK dalam menghadapi industrialisasi: Degradasi keterampilan dan ketenagakerjaan. Dalam *Prosiding INFEST Yogyakarta* (hlm. 43–46).

Dewi, E. (2019). Potret pendidikan di era globalisasi teknosentrisme dan proses dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan, 3*(1), 93–116. https://jurnal.sukmabangsa.sch.id/index.php/sukma/article/view/03105.2019/51

Gupta, T. (2018). The marketization of higher education. *International Journal of Recent Research Aspects, 5*, 1–8.

Hamuddin, B., Syahdan, S., Rahman, F., Rianita, D., & Derin, T. (2019). Do they truly intend to harm their friends? The motives beyond cyberbullying among university students. *International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning,*

9(4), 32–44. https://doi.org/10.4018/IJCBPL.2019100103

Hasanah, R., Iqbal, M., & Noor, I. (2024). Komersialisasi pendidikan dan implikasinya terhadap dakwah di era teknologi. *Bayan Lin Naas, 8*(2), 33–50.

Oentoro, Y. P., Auxilidora, I., Marcal, F., & Yasin, M. (2024). Konsep industrialisasi dan transformasi struktural. *Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2*(3), 10–18.

Purwaningrum, Alifiani, & Subhi, M. R. (2023). Faktor penyebab komersialisasi pendidikan. *INSURI, 2*(1), 84–95.

Saputra, K. (2023). Dampak kebijakan perguruan tinggi negeri. *Jurnal Ilmiah, 5*(4), 11943–11950.

Saputro, N. D. (2022). *Relevansi pemikiran Abdul Mukti Ali terhadap output pendidikan tinggi Islam di Indonesia pada era industri 4.0* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/39778/19913073.pdf

Unwanullah, A. (2015). Industrialisasi dan tantangannya pada sektor pendidikan. *Jurnal Economia, 11*(2), 107–117.

Yulianti, N., Wahhab, A. H., & Darmawan, A. A. (2024). Dampak komersialisasi pendidikan terhadap kesenjangan sosial. *Kariman, 12*(1), 61–74.

Zainuddin, & Rozali, M. (2022). Menyoal komersialisasi pendidikan di Indonesia. *Al Kaffah, 10*(2), 225–246.

Zamroni, M. I. (2008). Industrialisasi pendidikan tinggi. *Unisia, 31*(67). https://doi.org/10.20885/UNISIA.V31I67.171

Zulfirman, R. (2022). Implementasi metode outdoor dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, 3*(2), 147–153.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).